Membangun Etika Kewarganegaraan Global Melalui Karakter Moral Pancasila: Analisis Konseptual

Irma Irayanti [a, 1*], Kokom Komalasari [a, 2]

[a] *Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*
[1] *irmairayanti@upi.edu* *; [2] *kokom@upi.edu*
**korespondensi penulis*

Informasi artikel

Diterima:
22-02-2023
Disetujui:
23-05-2023

Kata kunci:
Analisis Konseptual
Karakter Moral Pancasila
Landasan Etis
Pendidikan Kewarganegaraan Global

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan global (*Global Citizenship Education*/GCE) merupakan bagian dari program berkelanjutan yang diinisiasi oleh UNESCO. Namun, konsep dan praktik GCE masih belum memiliki dasar teoretis yang jelas. Sebagian besar penelitian masih didasarkan pada prinsip kewarganegaraan Barat, sehingga kurang mempertimbangkan sumber-sumber non-Barat yang menawarkan potensi pembenaran etis, wawasan, dan arahan untuk GCE. Artikel ini menyajikan landasan etis untuk GCE yang berasal dari filosofi nilai moral Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang memuat aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual yang digunakan untuk mengkritik konsep GCE yang dianut oleh UNESCO dan mengusulkan Pancasila sebagai tawaran landasan etis GCE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter moral Pancasila dapat menjadi landasan etis yang lebih tepat untuk kewarganegaraan global, dan dapat digunakan untuk mengembangkan konsep GCE yang lebih inklusif dan holistik dengan memasukkan karakter moral Pancasila sebagai landasan etis. Artikel ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum GCE yang lebih luas dan memperhitungkan perspektif non-Barat dalam konteks pendidikan global.

Keywords:
Conceptual Analysis
Pancasila's Moral Character
Ethical Foundation
Global Citizenship Education

ABSTRACT

Constructing the ethics of global citizenship through the moral character of Pancasila: a conceptual analysis. Global Citizenship Education (GCE) is part of a sustainable program initiated by UNESCO. However, the concept and practice of GCE still lack a clear theoretical foundation. Most research is still based on Western citizenship principles, thus neglecting non-Western sources that offer potential ethical justifications, insights, and guidance for GCE. This article presents an ethical foundation for GCE derived from the moral values philosophy of Pancasila, which consists of five principles that include aspects of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. This study uses conceptual analysis method to critique the GCE concept adopted by UNESCO and proposes Pancasila as a basis for GCE's ethical foundation. The research results show that Pancasila's moral character can be a more appropriate ethical foundation for global citizenship and can be used to develop a more inclusive and holistic GCE concept by incorporating Pancasila's moral character as an ethical foundation. This article has important implications for the development of a broader GCE curriculum that considers non-Western perspectives in the context of global education.

Copyright © 2023 (Irma Irayanti, Kokom Komalasari). All Right Reserved

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan global atau Global Citizenship Education (GCE), telah menarik perhatian global sebagai bagian dari program berkelanjutan yang diinisiasi oleh UNESCO (Tan 2020). Meskipun program dan kemitraan baru telah didirikan di seluruh dunia untuk mendorong GCE, namun ada satu area yang belum sepenuhnya berkembang, yaitu dasar-dasar teoritis untuk konsep dan praktik GCE. Bamber et al. (2018) telah mencatat bahwa saat ini hanya terdapat analisis singkat mengenai landasan teoretis terkait GCE. Para ahli telah mengamati bahwa GCE masih

merupakan frasa yang ambigu dan bervariasi, dengan arti yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Terdapat pula berbagai teori, tipologi, dan ideologi yang bersaing dalam definisi kewarganegaraan global dan GCE. Begitupun dengan konsep GCE di Indonesia, dimana sumber nilai dalam pendidikan tidak terlepas dari karakter moral Pancasila yang menjadi landasan etis GCE di Indonesia (Rahim and Rahiem 2013).

Sementara Misiaszek & Misiaszek (2016) mengungkapkan bahwa konsep GCE yang adaa saat ini tidak terlepas dari prinsip kewarganegaraan Barat. Bahkan pengertian citizenship sendiri berasal dari konsep Yunani-Romawi yang berkaitan erat dengan demokrasi liberal yang memainkan hak sipil, politik dan sosial individu (Tan 2020).

Apa yang secara komparatif kurang dieksplorasi dalam penelitian tentang GCE adalah sumber-sumber non-Barat yang menawarkan potensi pembenaran etis, wawasan, dan arahan untuk GCE. Mengatasi kesenjangan penelitian ini, artikel ini menyajikan landasan etis untuk GCE yang berasal dari filosofi nilai moral Pancasila. Secara khusus, artikel ini menggambarkan gagasan landasan GCE dengan karakter moral Pancasila yang terdiri dari lima sila yang memuat aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Landasan etis karakter moral Pancasila dipilih dengan alasan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun pendidikan kewarganegaraan global yang efektif dan holistik, serta membantu siswa memahami peran mereka dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran di seluruh dunia.

Tan (2020) melaporkan bahwa literatur terkini tentang kewarganegaraan global memberikan perhatian yang relatif terbatas pada gagasan filosofis Timur. Oleh karena itu, sangatlah tepat dan penting untuk menyajikan perspektif karakter moral Pancasila mengingat pluralitas dan kontroversi mengenai definisi dan interpretasi GCE dari persfektif yang berbeda. Karena keterbatasan artikel ini tidak dapat membahas dan mengkritik semua definisi GCE dalam literatur yang masih ada, namun dibatasi pada frasa 'rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas'. Artikel ini akan menyoroti konsep GCE yang dianut UNESCO dengan alasan bahwa konsep ini yang paling banyak disebarluaskan dan diterima di dunia kontemporer. Namun konsep ini tidak memiliki landasan moral yang diartikulasikan dengan jelas untuk kewarganegaraan global. Oleh karena itu penting untuk mengusulkan landasan etis untuk GCE.

Metode

Untuk mengkritik konsep GCE yang dianut oleh UNESCO dan mengusulkan Pancasila sebagai tawaran landasan etis GCE. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi yakni metode analisis konseptual (Wekke 2020). Metode ini menganalisis mendalam konsep GCE dan Pancasila, serta membandingkan kedua konsep tersebut. Kegiatan diawali

dengan menentukan konsep GCE dan Pancasila yang relevan dengan tujuan lalu mengidentifikasi definisi GCE yang dianut oleh UNESCO dan karakter moral Pancasila. Analisis makna terhadap konsep GCE dan Pancasila memperhatikan konsep-konsep kewarganegaraan global, etika, moral, dan budaya. Selanjutnya membandingkan kedua konsep tersebut dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara konsep GCE dan Pancasila dalam hal landasan moral untuk kewarganegaraan global. Kritisi konsep GCE yang dianut oleh UNESCO dan kelemahan landasan moral yang diartikulasikan dengan jelas untuk kewarganegaraan global. Selanjutnya, dijelaskan mengapa karakter moral Pancasila dapat menjadi landasan etis yang lebih tepat untuk kewarganegaraan global untuk menemukan rekomendasi untuk pengembangan konsep GCE yang lebih inklusif dan holistik dengan memasukkan karakter moral Pancasila sebagai landasan etisnya.

Dalam melakukan analisis konseptual ini digunakan berbagai sumber seperti literatur, dokumen, dan pendekatan teori dan metodologi lain yang relevan, seperti etika, filsafat dan teori kewarganegaraan (M.A 2020). Selain itu juga penting untuk memperhatikan batasan dan kemungkinan bias dalam pemilihan teori dan sumber yang digunakan. Selain itu, dipertimbangkan juga kompleksitas dan dinamika konsep kewarganegaraan global serta interaksi dengan nilai dan norma lokal maupun global yang berbeda-beda.

Hasil dan pembahasan

Konsep UNESCO tentang GCE

Menurut UNESCO (2015), kewarganegaraan global mengacu pada: rasa memiliki keanggotaan dalam komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas. Ini menekankan pada ketergantungan dan keterhubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lokal, nasional, dan global.

UNESCO menafsirkan GCE sejalan dengan orientasi kosmopolitan yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan kewajiban moral universal daripada perbedaan manusia seperti etnis, agama, dan kewarganegaraan negara (Held and Brown 2011). Mengikuti definisi kewarganegaraan global, GCE berusaha untuk ‘memberdayakan peserta didik dari segala usia untuk mengambil peran aktif, baik secara lokal maupun global, dalam membangun masyarakat yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman' (Leite 2022). Untuk mencapai tujuan di atas, GCE meurut UNESCO bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik tiga dimensi konseptual inti: kognitif, sosio-emosional, dan perilaku UNESCO (2015).

Pertama, dimensi kognitif menggarisbawahi pengetahuan dan keterampilan berpikir yang diperlukan untuk lebih memahami dunia dan kompleksitasnya (Leite 2022) yang saling bergantung antara bangsa dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan

internasional (Tan 2020). Siswa harus memperoleh 'pengetahuan mendalam tentang isu-isu global dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat' (World Education Forum 2015 2015).

Kedua, dimensi sosio-emosional berpusat pada pentingnya memiliki ‘nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang memungkinkan peserta didik berkembang secara emosional, psikososial, dan fisik serta memungkinkan mereka untuk hidup bersama dengan orang lain secara hormat dan damai' (Leite 2022).

Menurut UNESCO (Tan 2020), dimensi perilaku terkait dengan tindakan yang efektif dan bertanggung jawab di semua tingkatan untuk mencapai dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan GCE yang holistik, transformatif, kontekstual, dan berbasis nilai, mengintegrasikan isi dan hasil pembelajaran, metode pengajaran, dan lingkungan belajar dalam pengaturan pembelajaran formal, non formal, dan informal. Tujuannya adalah untuk mengubah secara drastis peserta didik dan masyarakat, dan disesuaikan dengan kondisi budaya dan lokal. GCE juga didasarkan pada advokasi nilai-nilai universal seperti non-diskriminasi, kesetaraan, rasa hormat, dan dialog.

Siswa diharapkan dapat memahami cara beradaptasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dan mengembangkan keterampilan intrapersonal dan interpersonal. Selain itu, keterampilan kognitif dan non-kognitif, serta kapasitas perilaku seperti tindakan kolaboratif, bertanggung jawab, dan diarahkan untuk kebaikan bersama, juga diperlukan untuk mencapai tujuan GCE yang bukan hanya tentang menguasai kompetensi global, tetapi juga tentang kesadaran global yang mencakup nilai dan disposisi seperti empati dan kepekaan budaya (Tan 2020).

Salah satu tantangan utama dalam membangun CGE adalah membutuhkan dasar etis individu yang merasakan adanya keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas. Namun, dokumen-dokumen UNESCO tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang teori dasar apa yang dimaksud dengan "keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas" dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Untuk memahami interpretasi UNESCO tentang CGE yang kurang jelas, perlu dipahami juga tentang Education for Sustainable Development (ESD) atau Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut UNESCO (2019), CGE erat kaitannya dengan ESD karena CGE mendukung agenda UNESCO untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di bawah Kerangka Aksi Pendidikan 2030. CGE dipandu oleh Target 4.7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan UNESCO yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi semua

peserta didik untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan menghargai keragaman budaya serta kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan.

UNESCO (2007) menyatakan bahwa ESD tidak hanya tentang pengajaran tentang pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pemahaman lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, melainkan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan perspektif yang diperlukan untuk memelihara mata pencaharian yang berkelanjutan, serta membangun kapasitas untuk memungkinkan orang bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Namun, UNESCO tidak memberikan rincian spesifik tentang nilai-nilai dan perspektif apa yang harus ditanamkan serta sarana untuk membangun kapasitas agar dapat memotivasi orang bertindak secara etis untuk mencapai 'keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas'.

Kompetensi normatif dan berpikir kritis merupakan kompetensi inti yang direkomendasikan oleh UNESCO untuk ESD. Kompetensi normatif meliputi kemampuan untuk memahami dan merefleksikan nilai yang mendasari tindakan seseorang dan kemampuan untuk menegosiasikan nilai, prinsip, tujuan, dan target keberlanjutan dalam situasi yang kompleks. Sementara itu, kompetensi berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mempertanyakan norma, praktik, dan opini serta mengambil posisi dalam wacana keberlanjutan. Namun, tidak jelas bagaimana norma dan nilai ini dapat dikembangkan pada siswa.

UNESCO menegaskan bahwa ESD memberdayakan pelajar untuk terlibat dalam tindakan yang bertanggung jawab untuk integritas lingkungan, kelayakan ekonomi, dan masyarakat yang adil, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan yang bertanggung jawab dan bagaimana pelajar dapat termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Carson (2006) menggambarkan krisis kewarganegaraan sebagai masalah ontologis yang dapat diatasi dengan mengambil manfaat dari tradisi kebijaksanaan.

Meskipun penafsiran nilai moral sila-sila Pancasila relevan dengan GCE, artikel ini hanya akan fokus pada peluang konsep karakter moral Pancasila untuk menjadi landasan etis pendidikan kewarganegaraan global pada tiap silanya.

Etika Karakter Moral Ketuhanan

Falsafah Pancasila berfungsi sebagai panduan bagi manusia Indonesia untuk menjadi individu yang lebih mulia (Rahman 2018). Setiap sila Pancasila juga mengajarkan manusia Indonesia untuk menjadi individu yang berguna, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, agama, dan negaranya. Manusia

merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai keistimewaan, di antara keistimewaan tersebut terdapat naluri, akhlak, serta kemampuan berpikir yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya. Kemampuan berfikir ini menurut Wang (Tan 2020) merupakan pengetahuan bawaan yang mengacu pada perasaan dan kapasitas naluriah tentang benar dan salah untuk mengetahui dan melakukan yang baik (Tan 2020).

Pengetahuan naluriah itu merupakan anugerah Tuhan yang menjadi dasar sila pertama pada Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dengan memberi kebebasan kepada tiap-tiap orang untuk memeluk agama yang dipercayainya (Latif 2020). Konsep Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan bahwa manusia harus memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama.

Dalam konteks ini, keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia harus saling membantu dan menghargai satu sama lain sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya terhadap Tuhan.

Dengan demikian, nilai moral Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui tindakan keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas, yang melibatkan sikap saling menghargai, saling membantu, dan saling mengasihi sebagai tindakan nyata penghormatan terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Etika Karakter Moral Kemanusiaan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki lima prinsip yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang salah satu prinsip tersebut adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" atau *"Humanity that is just and civilized"*. Arifin & Lestari (2019) mengungkapkan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan kehidupan manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini mencakup juga 'keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas' karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Selain itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga menekankan nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial (Sabri 2021). Hal ini sejalan dengan ide etika nilai moral kemanusiaan yang telah dibahas sebelumnya. Dalam praktiknya, keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas dalam konteks Pancasila dapat diwujudkan dalam tindakan seperti menghormati hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, dan mempromosikan solidaritas sosial.

Konsep GCE menekankan pentingnya pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan keterikatan dengan komunitas dan umat manusia secara luas, yang juga merupakan nilai etika kemanusiaan Pancasila. Nilai etika kemanusiaan Pancasila, khususnya prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi, dan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Konsep pendidikan kewarganegaraan global yang juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman tentang keadilan sosial, dan keterampilan untuk bekerja sama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda (Ibrahim 2005).

Nilai etika kemanusiaan Pancasila juga mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Hal ini juga sejalan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan global yang mencakup pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang hak asasi manusia, penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, dan keterampilan untuk mengambil tindakan dalam rangka mempromosikan keadilan dan kesetaraan di seluruh dunia (Akkari and Maleq 2020). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan global dan nilai etika kemanusiaan Pancasila saling mendukung dan saling melengkapi (Erlina 2019). Melalui pendidikan kewarganegaraan global, siswa dapat mempelajari dan mengembangkan nilai etika kemanusiaan Pancasila, sehingga dapat menjadi warga negara global yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di seluruh dunia.

Etika Karakter Moral Persatuan

Artikel ini menjawab pertanyaan tentang apa arti rasa ‘persatuan’ dalam perspektif Pancasila. Makna filosofis ‘persatuan’ pada sila ketiga Pancasila dalam konteks warga negara global adalah bahwa keberhasilan dan kesejahteraan individu dan masyarakat tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan keseluruhan masyarakat global dan planet bumi (Heriadi Setyawan 2011). Sila Ketiga Pancasila mengakui bahwa semua manusia memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain di dalam dunia yang semakin saling terhubung.

Dalam era globalisasi ini, tindakan satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada negara-negara lain dan planet bumi secara keseluruhan. Persatuan dalam konteks ini mengacu pada pengakuan bahwa warga negara harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat global dan

lingkungan alam. Dalam konteks filosofis, persatuan yang dimaksud pada sila ketiga Pancasila bukan hanya sekadar bersatu secara fisik, tetapi juga bersatu secara batiniah (Darmawan 2018)

Saatnya kembali ke pertanyaan yang diajukan sebelumnya: apa yang dimaksud dengan 'rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas' UNESCO (2015) dan bagaimana pembelajar memperolehnya? Implikasi utama untuk GCE terkait karakter persatuan dapat ditarik dari konsep pengetahuan filosofis Pancasila. Dalam konteks filosofis Persatuan pada Pancasila, konsep ini dapat diartikan sebagai penghayatan atas nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan solidaritas yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai.

Burlian (2020) menyatakan bahwa filosofis Persatuan pada Pancasila mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya komunitas. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini tercermin pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan manusia untuk berhubungan baik dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan negaranya.

Selain itu, dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan yang menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua nilai-nilai ini mengajarkan bahwa manusia harus berkontribusi dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai, serta memperjuangkan kepentingan bersama.

Dengan demikian, 'rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas' sangat erat kaitannya dengan konsep filosofis persatuan pada Pancasila. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya serta memperjuangkan kepentingan bersama.

Etika Karakter Moral Demokrasi

Nilai karakter moral dalam demokarasi permusyawaratan rakyat pada Pancasila mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sila keempat menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang sama pentingnya juga digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan global, yaitu dengan mempromosikan dialog antarbudaya dan toleransi sebagai cara

untuk memperkuat pemahaman dan mengatasi perbedaan sesuai misi UNESCO (Pigozzi 2006).

Dalam demokrasi Pancasila, rasa memiliki juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan merasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas, kita dapat merasakan urgensi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Implikasi dari pernyataan UNESCO (2015) tentang rasa memiliki dapat terkait erat dengan konsep filosofis demokrasi Pancasila, dalam hal memperkuat identitas dan kesatuan bangsa, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan global dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu global, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila, termasuk dapat membantu mempromosikan sikap saling pengertian dan kerjasama dalam memecahkan masalah global, serta memperkuat rasa keterikatan dan tanggung jawab terhadap komunitas global yang lebih luas. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan global dan sila keempat Pancasila sangat erat, dan keduanya saling memperkuat dalam membangun individu yang memiliki kesadaran global, siap terlibat dalam pengambilan keputusan yang demokratis, dan mengembangkan sikap saling pengertian dan kerjasama dalam memecahkan masalah global.

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dapat menjadi landasan filosofis etis untuk memaknai "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas". Konsep ini dapat diartikan sebagai rasa tanggung jawab dan keterikatan emosional yang kuat terhadap lingkungan, masyarakat, dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Pemahaman tentang "rasa memiliki" juga dapat menjadi landasan filosofis etis dalam mengembangkan kebijakan publik dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, sila keempat dapat menjadi panduan untuk pengambilan keputusan yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan (Darmawan Harefa and Fatolosa Hulu 2020).

Selain itu, nilai-nilai dalam sila keempat juga dapat memperkuat rasa keterikatan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan kemanusiaan secara luas. Pemahaman yang kuat terhadap konsep "rasa memiliki" dapat memotivasi individu untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan

berkelanjutan, serta membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan global, konsep "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas" dapat diartikan sebagai rasa tanggung jawab dan keterikatan emosional yang kuat terhadap masyarakat dan kemanusiaan secara global. Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu global, serta siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep "rasa memiliki" juga dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan dalam skala lokal maupun global, serta untuk berkontribusi dalam memecahkan tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan.

Dengan demikian, konsep "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas" dapat menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan global, dan sila keempat Pancasila dapat menjadi landasan filosofis etis yang kuat untuk memaknai konsep ini dalam konteks pendidikan.

Etika Karakter Moral Keadilan

Untuk meciptakan pendidikan yang memberdayakan peserta didik dari segala usia untuk mengambil peran aktif, baik secara lokal maupun global, dalam membangun masyarakat yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman sesuai dengan definisi GCE UNESCO (2015) selaras dengan nilai yang terkandung dalam nilai falsafah Pancasila.

Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan dasar untuk membangun sikap moral individu, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial. Dalam konteks GCE, penting bagi individu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial, seperti persamaan hak, kebebasan, dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Hal ini penting untuk menjawab tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan sosial yang masih menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia. Dalam implementasi GCE, penting untuk memperkuat pendekatan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial. Konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dapat ditanamkan pada peserta didik melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan reflektif. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan, ke dalam kurikulum GCE. Dengan demikian,

peserta didik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global dan dapat berkontribusi dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi etika moral keadilan pada Pancasila mengajarkan nilai-nilai musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif, yang dapat diterapkan dalam konteks GCE. Individu perlu memahami pentingnya partisipasi aktif dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks isu-isu global yang kompleks dan multidimensional.

Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi landasan filosofis etis yang kuat untuk implementasi pendidikan kewarganegaraan global yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial. Konsep "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas" pada GCE dapat dikaitkan dengan implikasi etika moral keadilan pada Pancasila. Rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas mengacu pada perasaan tanggung jawab dan keterlibatan individu dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di skala global. Etika moral keadilan pada Pancasila menuntut individu untuk memiliki sikap moral yang adil dan berkeadilan dalam menghadapi isu-isu global, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Melalui GCE, individu dapat memperluas perspektif mereka, memperdalam pemahaman tentang isu-isu global, dan meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya yang penting diperlukan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

GCE juga dapat membantu individu memahami kompleksitas dan interkoneksi isu-isu global, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Dalam konsep "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas" pada pendidikan kewarganegaraan global dapat menjadi landasan untuk membentuk sikap moral yang adil dan berkeadilan pada individu. Dengan memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, individu dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di skala global.

Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia yang memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan untuk membangun pendidikan kewarganegaraan global. Pendapat ini juga sejalan dengan upaya-upaya PBB dan UNESCO dalam mempromosikan pendidikan kewarganegaraan global sebagai upaya untuk membentuk warga negara global yang bertanggung jawab, sadar akan isu-isu global, dan

berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila juga diakui oleh banyak ahli dan praktisi pendidikan sebagai dasar untuk membangun kurikulum dan metode pembelajaran yang holistik dan inklusif.

Kesimpulan

Banyak program dan kemitraan yang telah didirikan di seluruh dunia untuk mendorong GCE, namun dasar-dasar teoritis untuk konsep dan praktik GCE masih belum sepenuhnya berkembang. Salah satu area yang kurang dieksplorasi adalah sumber-sumber non-Barat yang dapat menawarkan potensi pembenaran etis, wawasan, dan arahan untuk GCE. Artikel ini menawarkan landasan etis untuk GCE yang berasal dari filosofi nilai moral Pancasila. Karakter moral Pancasila dipilih sebagai dasar untuk membangun pendidikan kewarganegaraan global yang efektif dan holistik karena nilai-nilai dalam Pancasila dapat membantu siswa memahami peran mereka dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran di seluruh dunia. Artikel ini menyajikan landasan etis untuk Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCE) yang berasal dari filosofi nilai moral Pancasila di Indonesia.

Nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, dapat dijadikan dasar untuk membangun pendidikan kewarganegaraan global yang efektif dan holistik. Landasan etis karakter moral Pancasila dapat membantu siswa memahami peran mereka dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran di seluruh dunia. Artikel ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan konsep GCE yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai-nilai non-Barat, serta memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan kewarganegaraan global yang lebih holistik dan efektif. Pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti keadilan sosial, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan untuk hidup bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan bersama di atas kepentingan individual atau golongan.

Pancasila dapat menjadi landasan etis dari frasa "rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas" karena mengandung nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi martabat manusia dan persatuan antarbangsa. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong, yaitu semangat saling membantu dan bekerja sama dalam

kebaikan bersama. Semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi landasan moral untuk mendorong individu dan masyarakat untuk mengembangkan rasa memiliki tersebut. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi dasar moral yang kuat untuk memperkuat dan mengembangkan rasa memiliki terhadap komunitas dan kemanusiaan yang lebih luas.

Referensi

Akkari, Abdeljalil, and Kathrine Maleq. 2020. "Rethinking Global Citizenship Education: A Critical Perspective." *Global Citizenship Education* 205–17. doi: 10.1007/978-3-030-44617-8_15.

Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. 2019. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5(2):12. doi: 10.23887/jkh.v5i2.16497.

Bamber, Philip, David Lewin, and Morgan White. 2018. "(Dis-) Locating the Transformative Dimension of Global Citizenship Education." *Journal of Curriculum Studies* 50(2):204–30. doi: 10.1080/00220272.2017.1328077.

Burlian, Paisol. 2020. "Pemikiran Sukarno Dalam Perumusan Pancasila." *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang* 5(2):159.

Carson, Terrance R. 2006. "The Lonely Citizen: Democracy, Curriculum, and the Crisis of Belonging." *Troubling the Canon of Citizenship Education* 25–30.

Darmawan. 2018. "Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di Era Globalisasi." 1–120.

Darmawan Harefa, and Fatolosa Hulu. 2020. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. PM Publisher.

Erlina, Terra. 2019. "Membangun Karakter Ke-Indonesiaan Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Global." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 8(2):153–62. doi: 10.17509/factum.v8i2.21612.

Held, David, and Garrett Wallace Brown. 2011. "The Cosmopolitanism Reader." 491.

Heriadi Setyawan. 2011. "Pancasila Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia." 1–11.

Ibrahim, Tasneem. 2005. "Global Citizenship Education: Mainstreaming the Curriculum?" *Cambridge Journal of Education* 35(2):177–94. doi: 10.1080/03057640500146823.

Latif, Y. 2020. "Reaktualisasi Pancasila."

Leite, Stephanie. 2022. "Using the SDGs for Global Citizenship Education: Definitions, Challenges, and Opportunities." *Globalisation, Societies and Education* 20(3):401–13. doi: 10.1080/14767724.2021.1882957.

M.A, Prof. Dr. Dede Rosyada. 2020. *Penulis Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Prenada Media.

Misiaszek, Greg William, and Lauren Ila Misiaszek. 2016. "Global Citizenship Education and Ecopedagogy at the Intersections : Asian Perspectives in Comparison." *Asian Journal of Education* 17(S):11–37. doi: 10.15753/aje.2016.05.17s.11.

Pigozzi, Mary Joy. 2006. "A UNESCO View of Global Citizenship Education." *Educational Review* 58(1):1–4. doi: 10.1080/00131910500352473.

Rahim, Husni, and Maila Dinia Husni Rahiem. 2013. "The Use of Stories as Moral Education for Young Children." *International Journal of Social Science and Humanity* 2(6):454–58. doi: 10.7763/ijssh.2012.v2.145.

Rahman, Alip. 2018. "Nilai Pancasila Kondisi Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Global." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 3(1):34–48.

Sabri, Muhammad. 2021. "Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis." *Jurnal Pembumian Pancasila* 1(1):28.

Tan, Charlene. 2020. "An Ethical Foundation for Global Citizenship Education: A Neo-Confucian Perspective." *Journal of Beliefs and Values* 41(4):446–57. doi: 10.1080/13617672.2019.1683431.

UNESCO. 2007. *Education for Sustainable Development: Linking Learning and*

Happiness.
UNESCO. 2015. "Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives." *Global Citizenship Educationhip Education* 72.
UNESCO. 2019. "What UNESCO Does on Global Citizenship Education." *Unesco*. Retrieved (https://en.unesco.org/themes/gced/action).
Wekke, Ismail Suardi. 2020. "Hasil Dan Pembahasan Untuk Artikel Konseptual." *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin* 1(5):1–7.
World Education Forum 2015. 2015. "Framework for Action Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All (DRAFT)." (April).